

# KINERJA APARATUR DINAS SOSIAL TERHADAP PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH EKONOMI AKIBAT COVID-19 DI KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA

Mickael Alexander Kedepa

NPP. 29.1794

*Asdaf Kabupaten Paniai, Provinsi Papua*

*Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: kedepajr078@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The performance of the Social Service in the Distribution of Cash Social Assistance (CSA) in an Effort to Overcome Economic Problems Due to Covid-19 in Paniai Regency, Papua Province, is considered to be experiencing problems in distribution. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the performance of the Social Service apparatus towards the distribution of social assistance to overcome economic problems due to the impact of COVID-19 in Paniai Regency. **Method:** The method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Collecting data in the field using interview, observation and documentation techniques. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that there are several obstacles in the field including, the lack of funds, infrastructure, the vast area of Nabire Regency, the low level of public awareness regarding government programs, communication networks and the covid-19 pandemic. **Conclusion:** The implementation of the performance of the Paniai District Social Service Apparatus is based on the concept of 5 aspects of apparatus performance appraisal which include the quality of work results, timeliness, initiative, ability, and communication. Each has a pretty good value. **Keywords:** Performance, Cash Social Assistance, Pandemic Covid-19

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kinerja Aparatur Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Menanggulangi Masalah Ekonomi Akibat Covid-19 Di Kabupaten Paniai Provinsi Papua dinilai mengalami masalah dalam penyaluran. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja aparatur Dinas Sosial terhadap penyaluran bantuan sosial untuk menanggulangi masalah ekonomi dampak covid-19 di Kabupaten Paniai. **Metode:** Metode yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data di lapangan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu terdapat beberapa hambatan di lapangan diantaranya, minimnya dana, sarana prasarana, luasnya wilayah kabupaten nabire, rendahnya kepedulian masyarakat terkait program pemeritah, jaringan komunikasi dan pandemi covid-19. **Kesimpulan:** Pelaksanaan kinerja Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Paniai, berdasarkan konsep 5 aspek penilaian kinerja aparatur yang meliputi kualitas hasil kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi. Masing-masing memiliki nilai cukup baik. **Kata kunci:** Kinerja, Bantuan Sosial Tunai, Pandemi Covid-19

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Sumber pendanaan untuk hibah dan bantuan sosial diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tujuannya agar dalam pengelolaannya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, yang mana anggarannya juga dapat berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk dilaksanakan oleh Presiden. Pengaturan mengenai keuangan negara selalu di dasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Bab VIII Amandemen IV pasal 23 ayat 1 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa “Anggaran pendapatan belanja dan negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun untuk dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pasal 1 Ayat 1 yaitu Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Maka di keluarkan program Bantuan Sosial Tunai (BST), Penyaluran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah di atur pada Permensos No. 1 Tahun 2019, maka pemerintah daerah membuat peraturan Gubernur Papua No. 66 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring, Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial.

Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) pertama masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 dimana penyebarannya cepat dan semakin meluas hampir di seluruh daerah. Wabah ini menyebabkan jumlah kemiskinan bertambah sangat signifikan hingga mencapai sekitar 4,17 juta jiwa bulan Agustus 2021. Jumlah tersebut meningkat dibanding bulan September 2020 yang mencapai 3,38 juta jiwa. Maka dari itu, pemerintah mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga yang pendanaannya berasal dari Dana Desa atau dinamakan BLT-Dana Desa yang tujuannya guna meringankan beban ekonomi warga miskin yang terdampak pandemi COVID-19. Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh virus corona sangat mempengaruhi kesejahteraan hidup warga. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pembatasan aktivitas perekonomian makro, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, dan sebagian besar masyarakat tidak dapat melanjutkan pekerjaannya disebabkan pembatasan tersebut. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya angka kemiskinan.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kinerja aparatur Dinas Sosial terhadap Bantuan Sosial Tunai (DT) di Kabupaten Paniai. Beberapa permasalahan yang menjadi faktor akibat penyaluran Dana Desa ke Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Paniai, Perlu adanya pengawasan yang tepat dalam pelaksanaan atau penyaluran Bantuan Sosial Tunai. Salah satunya adalah masyarakat yang belum terdaftar dalam penerima dana Bantuan Sosial Tunai dan masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk lebih dari satu. Beberapa kasus terkait adanya penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dana Kabupaten Paniai sebagai berikut: penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai tidak tepat sasaran terhadap masyarakat yang membutuhkan, pendataan terhadap penerima Bantuan Sosial Tunai kurang valid, dan terdapat masyarakat yang tidak memiliki



Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga tidak dapat terdaftar dalam penerima Dana Bantuan Sosial Tunai

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian yang ditulis oleh Fany Rahmawati tahun 2020 dengan judul penelitian “Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)”. Tujuannya guna menilai akuntabilitas penyaluran dana bantuan PKH versi Antonio Bar cendon yang dilaksanakan Dinsos Kota Surakarta. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil analisa PKH Kota Surakarta sudah memenuhi akuntabilitas administratif versi Antonio Bar Cendon, akan tetapi akuntabilitas ini tidak terlihat pada penanganan pemutakhiran data sebab lambatnya penanganan dalam memperbarui data, hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat yang masih mendapatkan bantuan PKH yang harusnya tidak mendapatkan bantuan lagi. Selanjutnya penelitian yang ditulis Aldi Sajian dari Universitas Muhammadiyah Mataram yang dilakukan pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram Tahun 2020”. Tujuannya guna menganalisa penerapan dari Program BST Dalam menanggulangi Masalah Ekonomi dampak Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram Tahun 2020. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dari hasil analisa. Kemudian ada penelitian yang ditulis Filsa Alviyanzah pada tahun 2019 yang berjudul “Peran Aparatur Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa”. Tujuannya guna menilai peranan dari Dinsos terkait kebijakan, aturan, strategi untuk menyalurkan bansos guna menanggulangi kemiskinan di Kab. Sumbawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa inerja Aparatur Dinas Sosial memenuhi kebutuhan publik terkait pemberian bantuan sosial di Kabupaten Sumbawa. Hambatan yang paling menonjol dari pelaksanaan peran Aparatur Dinas Sosial adalah kurangnya sosialisasi sehingga proses yang masih belum maksimal.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni kinerja aparatur Dinas Sosial terhadap Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Paniai, metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori efektivitas yang berbeda dari penelitian Aldi Sajian (2021) dimana penelitian yang dilakukan oleh Aldi Sajian (2021) menggunakan teori implementasi. Penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada efektivitas dari Bantuan Sosial di Kabupaten Paniai yang mana berbeda dengan penelitian oleh Fany Rahmawati (2020) yang membahas tentang pelaksanaan akuntabilitas penyaluran sosial PKH di Kota Surakarta dalam menertibkan administratif.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui kinerja aparatur Dinas Sosial terhadap penyaluran bantuan sosial untuk menanggulangi masalah ekonomi dampak covid-19 di Kabupaten Paniai.

## II. METODE

Simangunsong (2017: 83) dalam bukunya berjudul Metodologi Penelitian mengemukakan bahwa setiap penelitian baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif dalam ilmu pemerintahan sebaiknya selalu berangkat dari masalah bukan judul. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian induktif yang mana penelitian ini diawali dengan beberapa identifikasi masalah

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari kepala wilayah Kepala Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Paniai, Kepala Sub Bagian Program Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Paniai, Kepala Bidang Penangan Fakir Miskin Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Paniai, Operator Program Keluarga Harapan (PKH) masing-masing 1 orang, dan masyarakat (dalam hal ini keluarga yang menerima bantuan sosial tunai di Kabupaten Paniai 5 orang). Adapun analisisnya menggunakan teori kinerja menurut Mitchel dan Larson (Imron, 2018) yang menyatakan menilai kinerja aparatur mencakup: kualitas hasil kerja (*quality of work*), ketepatan waktu (*promptness*), inisiatif (*initiative*), kemampuan (*capability*), dan komunikasi (*communication*).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Analisis Fokus Dari Kinerja Aparatur Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (Bst) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Covid-19 Di Kabupaten Paniai Provinsi Papua

Analisis pada bagian ini memfokuskan untuk menganalisis mengenai Objek Kinerja, Hambatan, dan Upaya yang tertuang dalam fokus magang yang kemudian penulis akan sesuaikan dengan data yang diperoleh berupa data primer maupun sekunder maupun dari hasil wawancara.

#### 3.1.1 Kualitas Hasil Kerja *Quality Of Work*)

Berdasarkan dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diketahui bahwa hasil kerja Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Paniai Provinsi Papua saat dapat di katakan sudah cukup baik, tetapi belum maksimal karena adanya hambatan dan kendala seperti, menurunnya kinerja Aparatur Dinas Sosial dalam bekerja di tengah pandemi COVID-19 yang di akibatkan karena pegawai merasa cemas apabila tertular oleh COVID-19 dan letak geografis Kabupaten Paniai yang berada di pengunungan tengah papua dengan memiliki satu danau membuat susah nya pembangunan di Kabupaten Paniai. contohnya kendala dalam penyaluran bantuan sosial tunai. Namun tanggapan dari masyarakat masih saja ada masyarakat dan daerah yang terlambat mendapatkan bantuan sosial tunai sesuai jadwal pembagian yang ditentukan.

#### 3.1.2 Ketepatan Waktu (*Promptness*)

Ketepatan waktu ini berpengaruh terhadap kinerja seorang aparatur, ketika seseorang tidak dapat menyelesaikan suatu tugas yang diberikan tidak selesai dengan waktu yang diberikan, tentu otomatis akan meminta waktu tambahan dan hal inilah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Dalam konteks ini, konsep ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas yaitu kecepatan dan ketepatan waktu aparat dalam mentepati waktu, spontanitas aparat dalam menangani permasalahan dalam melayani masyarakat, dan daya tanggap aparat dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

##### 1. Kecepatan dan Ketepatan Waktu

Berdasarkan dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan oleh, maka dapat diketahui bahwa hasil dari kecepatan dan ketepatan waktu Dinas Sosial, saat ini sudah dapat di katakan cukup baik, namun belum maksimal karena adanya beberapa hambatan dalam



pelaksanaan tugas di lapangan. Luasnya wilayah Kabupaten Paniai serta Keterbatasan sarana dan prasarana, dan kemudian pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu hambatan Aparatur Dinas Sosial dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai.

2. Spontanitas

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang di dapatkan, bahwa Spontanitas Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Paniai sudah cukup baik, namun belum optimal karena ada beberapa masalah terkait kurangnya agaran, luasnya wilayah Kabupaten Paniai, keterbatasan sarana dan prasarana, dan pengaruh pandemi COVID-19, serta masih ada keluhan masyarakat tentang perlunya peningkatan waktu Aparatur Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial tunai dan pemberian pelayanan harus di tingkatkan.

3. Daya Tanggap

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang di peroleh dapat di ketahui bahwa daya tanggap Aparatur Dinas Sosial sudah cukup baik, namun terdapat kendala seperti, jarak yang cukup jauh antar Distrik dan kabupate, serta sarana dan prasarana yang seharusnya dibutuhkan masih belum ada dan belum memadai. Hal ini sangat mempengaruhi proses dari daya tanggap Dinas Sosial, sehingga kedepanya Aparatur Dinas Sosial akan menyediakan sarana dan prasana yang memadai agar penyaluran bantuan sosial dapat tersalurkan sesuai jadwal penyaluran yang di tentukan

### 3.1.3 Inisiatif (*Initiative*)

Aparatur dalam memberi suatu keputusan dan kebijakan yang baik adalah apabila dalam perumusannya dilakukan secara musyawarah atau secara bersama. Sehingga aspirasi atau inisiatif dari atasan maupun bawahan secara vertikal dapat terlibat dan menjadikan sebagai suatu kebiasaan. Dalam hal ini, inisiatif menjadi hal yang sangat penting untuk memunculkan hal-hal baru atau ide yang belum pernah muncul sebelumnya. Sehingga dalam konteks ini, konsep inisiatif yaitu tindakan apa yang dilakukan dalam pemecahan permasalahan dan pemberian ide atau gagasan oleh aparat, organisasi atau instansi

1. Tindakan

Berdasarkan pada hasil observasi, dan dokumentasi di lapangan, terkait bagaimana upaya yang telah dilakukan Aparatur Dinas Sosial untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, penulis melihat bahwa Aparatur Dinas Sosial di lapangan dalam pelaksanaan tugas, sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dengan tetap berupaya menyalurkan bantuan sosial secara transparan dan akuntabel. Seperti yang terlihat pada data penyaluran bantuan sosial tunai, yang menjadi salah satu objek dukungan data peneliti, untuk melihat catatan penyaluran bantuan sosial tunai sebagai bentuk bukti tindakan kinerja yang telah di laksanakan, sebagai bukti bahwa Aparatur Dinas Sosial tetap melaksanakan tugasnya menyalurkan bantuan sosial tunai

2. Pemberian Ide/Gagasan

Berdasarkan hasil wawancara maka masyarakat mengadu ketika terdapat masalah terkait pendataan dan penyaluran Bantuan Sosial Tunai, masyarakat akan mengadu paling awal kepada kantor distrik terkait, dan setelah kantor distrik menerima pengaduan dari masyarakat, kepala distrik akan menindak lanjuti dengan menyampaikan kepada Dinas Sosial. Kemudian Aparatur Dinas Sosial selalu bersikap terbuka dalam menerima pengaduan dan saran dari masyarakat. Dimana aspirasi dan pengaduan tersebut di bahas dalam rapat dan kemudian di cari solusi terbaik sesuai keinginan dari masyarakat. Namun yang paling terkadang masyarakat menyampaikan pengaduan dengan cara merusak fasilitas kantor terlebih dahulu, hal ini terbukti ketika peneliti melakukan penelitian di kantor Dinas Sosial Kabupaten Paniai, kantor

di palang menggunakan kayu tepat di depan pintu kantor. Sehingga menjadi koreksi bagi Kepala Aparatur Dinas Sosial sebagai pimpinan Aparatur Dinas Sosial untuk memperbaiki diri, Kepala Aparatur Dinas Sosial juga sudah mengambil langkah tegas dengan menegur keras para kepala distrik untuk harus melakukan sosialisasi terkait cara pengaduan dengan baik dan benar, agar hal ini tidak terjadi terus menerus

#### **3.1.4 Kemampuan (*Capability*)**

Kemampuan atau dapat diartikan sebagai kecakapan atau potensi seorang individu untuk menguasai keahlian dalam mengerjakan berbagai tugas yang diberikan dalam suatu pekerjaan. Apabila seseorang memiliki kemampuan yang baik tentu dia tidak akan mengalami kesulitan yang berarti dalam menghadapi masalahnya yang dihadapi dalam pekerjaannya karena memiliki suatu keterampilan

1. Kemampuan Aparatur Dinas Sosial dalam mencapai target penyaluran  
Berdasarkan pada hasil observasi, dan dokumentasi penulis di lapangan, terkait Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Aparatur Dinas Sosial pada masa yang akan datang dalam meningkatkan tertib penyaluran bantuan sosial, berdasarkan pengamatan di lapangan penulis melihat bahwa aparatur tetap aktif dan berupaya dalam penanganan bencana dan pandemi COVID-19, seperti yang tertera pada catatan penanganan pandemi COVID-19 menjadi salah satu objek dari penelitian penulis, untuk melihat catatan penanganan pandemi COVID-19 sebagai bentuk bukti bahwa aparatur sudah memenuhi target pekerjaan dalam penanganan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Paniai
2. Kemampuan Dinas Sosial dalam memecahkan masalah  
Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara bahwa kemampuan Aparatur Dinas Sosial dalam menangani permasalahan yang timbul dalam penyaluran bantuan sosial tunai, masih kurang maksimal dikarenakan mininya sarana prasarana, luas wilayah Kabupaten Paniai dengan memiliki danau, sungai dan pegunungan yang tinggi, serta kurangnya akses infrastruktur dan jaringan telekomunikasi. Sehingga mempersulit Aparatur Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial dan menangani masalah dalam penyaluran bantuan sosial. Oleh sebab itu Aparatur Dinas Sosial mengambil langkah tegas dengan menyerahkan tanggung jawab dalam proses penyaluran kepada para Kepala Distrik. Karena kepala distrik lebih memahami keinginan dari masyarakatnya

#### **3.1.5 Komunikasi (*Communication*)**

Komunikasi merupakan bagian penting untuk mencapai sebuah tujuan yang didasari dengan komunikasi yang baik antar individu dan kelompok sehingga adanya keterkaitan maupun hubungan berbanding lurus dengan antar pihak yang berkomunikasi, komunikasi yang baik akan memberikan efek dan dampak yang baik pada kinerja aparatur dalam sebuah organisasi tersebut. kemudian dalam konteks ini, konsep komunikasi yaitu komunikasi intern dan ekstern, serta relasi dan kerja sama dalam penyaluran bantuan sosial tunai di tengah pandemi COVID-19

1. Komunikasi Intern dan Ekstern  
Berdasarkan dari pada hasil observasi, dokumentasi dan wawancara yang peroleh maka komunikasi eksternal maupun internal sudah berjalan baik, hal ini juga di dukung dengan pengakuan masyarakat yang melihat jalinan koordinasi dan komunikasi antara pihak Dinas Sosial dengan TNI-POLRI, Satpol-PP dan para Kepala Distrik yang bersama-sama terlibat dalam penyaluran bantuan sosial tunai di Kabupaten Paniai
2. Relasi dan Kerja Sama dalam pelaksanaan tugas  
Berdasarkan pada hasil observasi, dan dokumentasi di lapangan, terkait bagaimana Komunikasi Aparatur Dinas Sosial dalam relasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas



Aparatur Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial tunai di tengah pandemi COVID-19, sudah berjalan dengan baik, hal ini di dukung dengan komunikasi baik internal dan eksternal tetap berjalan dengan cukup baik

### **3.2. Faktor Penghambat Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Paniai Provinsi Papua**

Dinas Sosial Kabupaten Paniai Provinsi Papua memiliki hambatan dalam pelaksanaan program penyaluran bantuan sosial tunai yang tentunya akan menghambat tercapainya tujuan organisasi, hambatan merupakan subjek pada poin kedua fokus magang. Penghambat kinerja Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Paniai Provinsi Papua dalam penyelenggaraan pelayanan penyaluran bantuan sosial tunai antara lain.

#### **1. Minimnya Dana**

Berdasarkan dari keterangan kepala Dinas Sosial dan data dari LAKIP mengenai dana memang untuk tahun 2021 mengalami kekurangan anggaran penunjang kegiatan, khususnya pada Bidang Penangan Fakir Miskin, sehingga hal ini mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan lapangan, dimana memang anggaran pada tahun 2020 lebih kecil anggarannya di bandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya

#### **2. Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat akan Pentingnya Program Pemerintah**

Kurangnya kesadaran dan Kepedulian masyarakat akan pentingnya program pemerintah memang menjadi faktor penghambat dalam penyaluran bantuan sosial tunai dalam menanggulangi masalah ekonomi akibat COVID-19. dikarenakan memang kurangnya tingkat pendidikan dan budaya masyarakat lokal, menjadi salah satu parameter bagi kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mengikuti program pemerintah. Hal ini dapat dilihat juga dari tingginya angka masyarakat yang tidak terdaftar dalam data calon penerima karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih terus ada di Kabupaten Paniai

#### **3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana**

Minimnya Sarana dan Prasarana penunjang Aparatur Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial tunai tentunya menjadi salah satu faktor yang menghambat kinerja Aparatur Dinas Sosial dan kemampuan Aparatur Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas, terlebih pada Bidang Penangan Fakir Miskin dan Bidang Operator Program Keluarga Harapan (PKH), kendala fasilitas seperti motor trail dan mobil patroli yang sudah rusak dan belum tersedia serta kurangnya fasilitas speedboot. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam penyaluran bantuan sosial tunia, dalam hal memonitoring dan mengawas proses penyaluran

#### **4. Luasnya Wilayah Kabupaten Paniai dan Jaringan Komunikasi**

Berdasarkan pada data BPS Kabupaten Paniai mempunyai luas 18.104,63 Km<sup>2</sup> dan empat sungai, serta memiliki satu danau dengan luas 154 km<sup>2</sup> yang dikelilingi oleh gunung-gunung besar, sehingga membentuk sebuah cekungan raksasa yang menawan. Membuat Aparatur Dinas Sosial mengalami kesulitan seperti jalan yang sulit di tempuh, dan ada terdapat daerah yang tidak dapat ditempuh dengan jalur darat di beberapa desa di Kabupaten Paniai, tetapi harus di tempuh dengan jalur air maupun udara. Tentunya hal ini sangat berpengaruh pada kinerja Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Paniai Provinsi Papua dalam menyalurkan bantuan sosial tunai. Kemudian tidak semua daerah di Kabupaten Paniai memiliki telekomunikasi yang kurang bagus

### **3.3. Faktor Pendukung Kinerja Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Paniai Provinsi Papua**

Berdasarkan analisis ada terdapat juga beberapa faktor pendukung yang dapat menunjang dan meningkatkan kinerja Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Paniai Provinsi Papua, dapat dilakukan upaya-upaya berikut :

1. **Peningkatan Pengadaan Sarana Prasarana**  
Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana dapat mendukung Aparatur Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial tunai, menjadi salah satu faktor pendukung kinerja Aparatur Dinas Sosial dan kemampuan Aparatur Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas, terlebih pada Bidang Penangan Fakir Miskin dan Bidang Operator Program Keluarga Harapan (PKH), dalam penyaluran bantuan sosial. Pengadaan sarana prasana yang dibutuhkan seperti speedboot, mobil patroli, dan motor trail. Tidak Hanya itu pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi faktor pendukung pelayan pemerintah Kabupaten Paniai kepada masyarakat
2. **Meningkatkan Kegiatan Sosialisasi Kepada Masyarakat Terhadap Pentingnya Program Pemerintah**  
Berdasarkan situasi yang terjadi di lapangan banyak masyarakat yang tidak mengikuti program pemerintah seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), oleh karena itu Aparatur Dinas Sosial harus meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya mengikuti kegiatan pemerintah. Tidak hanya Aparatur Dinas Sosial yang mengadakan sosialisasi tetapi pemerintah daerah Kabupaten Paniai juga
3. **Pengawasan Maksimal Penyaluran Bantuan Sosial**  
Berdasarkan laporan tertulis Operator Penerima Keluarga Harapan (PKH), Peningkatan pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai harus sampai pada tingkat paling rendah yakni masyarakat, karena selamanya pengawasannya hanya sampai pada penyaluran sampai pada tingkat kepala distrik dan tidak sampai pada masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya sarana prasarana penunjang pengawasan penyaluran

### **3.4. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Kinerja Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Paniai Provinsi Papua**

Berdasarkan analisis ada beberapa hambatan yang menjadi permasalahan bagi Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Paniai Provinsi Papua, Untuk mengatasinya dapat dilakukan upaya-upaya berikut :

1. **Optimalisasi penggunaan anggaran**  
Berdasarkan data LAKIP yang didapat dalam upaya yang dilakukan oleh Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Paniai adalah pengoptimalan anggaran yang ada agar seluruh program yang ada dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah dengan mengatasi kekurangannya anggaran dalam menunjang kegiatan-kegiatan khususnya di bidang Penangan Fakir Miskin sehingga tidak menghambat kegiatan lapangan
2. **Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya program masyarakat**  
Aparatur Dinas Sosial untuk mengatasi hambatan-hambatan terkait kepedulian masyarakat dan upaya mengatasi luas wilayah dan jaringan antara lain, Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan tentang kepedulian akan pentingnya mengikuti program dari pemerintah, sehingga diharapkan dapat membantu Aparatur Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial tunai dan mengurangi masalah yang terjadi dalam penyaluran
3. **Menambah sarana dan prasarana dalam menunjang penyaluran bantuan sosial**  
Berdasarkan laporan tertulis pada laporan pelaksanaan Sub Bagian Program Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Paniai yang membutuhkan penambahan dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti :



- 2 unit wifi kantor
- 4 unit komputer
- 5 unit speedboot (transportasi air)
- 3 unit mobil patroli (memonitoring proses penyaluran)
- 4 unit motor trail (mengawasi proses penyaluran)

Tidak hanya sarana prasana saja yang, upaya mengatasi faktor penghambat juga, dengan membangun infrastruktur jalan penghubung kota dengan kampung-kampung

#### 4. Meningkatkan kualitas pendidikan sumberdaya dan kedisiplinan aparatur Dinas Sosial Kabupaten Paniai Provinsi Papua

Upaya yang di lakukan oleh Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Paniai Provinsi Papua dalam meningkatkan kualitas Aparatur Dinas Sosial dengan memberikan sanksi yang tegas bagi para pihak pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban dan tugas, ataupun yang kehadiran dan keaktifannya kurang, seperti pemotongan tunjangan.

### 3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka memperbaiki perekonomian di Kabupaten Paniai. Penulis menemukan temuan penting yakni masih banyak masyarakat yang belum menerima program Bantuan Sosial Tunai (BST). Sama halnya dengan temuan Aldi Sajian bahwa pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai masih belum efektif karena masih ada masyarakat yang belum mendapatkannya disebabkan keterbatasan upaya-upaya mengembangkan kebutuhan di lapangan (Sajian, 2020).

Layaknya program lainnya, program Bantuan Sosial Tunai ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah minimnya dana, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya program pemerintah, keterbatasan sarana dan prasarana serta luasnya wilayah kabupaten paniai dan jaringan komunikasi. Kinerja aparatur Dinas Sosial dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Paniai dinilai cukup baik namun dalam hal memecahkan masalah belum maksimal dan dinilai kurang, layaknya temuan Filsa Alviyanzah dimana pada penelitian yang dilakukan bahwa hambatan yang paling menonjol dari pelaksanaan peran aparatur Dinas Sosial adalah proses yang masih belum maksimal (Alviyanzah, 2019).

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Kinerja Aparatur Dinas Sosial terhadap penyaluran bantuan sosial tunai Kabupaten Paniai Provinsi Papua di tengah pandemi COVID-19 berdasarkan pada hasil analisis observasi, dokumentasi, dan wawancara penulis, dengan menggunakan lima aspek penilaian kinerja aparatur yang di mulai dengan kualitas hasil kerja, ketepatan waktu, inisiatif, dan komunikasi, dinilai yang cukup baik. Adapun untuk aspek kemampuan, pada dimensi kemampuan aparatur dalam memenuhi target penyaluran di nilai cukup baik, namun pada dimensi kemampuan Aparatur Dinas Sosial dalam memecahkan masalah di nilai kurang.
2. Dinas Sosial Kabupaten Paniai Provinsi Papua dalam penyaluran bantuan sosial tunai kepada masyarakat untuk menanggulangi masalah ekonomi akibat COVID-19, dalam pelaksanaannya memiliki hambatan seperti adanya Pandemi COVID-19, minimnya dana, minimnya sarana prasarana, luasnya wilayah daerah, kebudayaan kehidupan masyarakat dan jaring komunikasi belum merata ke seluruh daerah di Kabupaten Paniai.

3. Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Paniai Provinsi Papua telah banyak melakukan upaya dan usaha dalam penyaluran bantuan sosial tunai untuk menganggulangi masalah ekonomi COVID-19. Namun dirasa belum cukup sehingga perlu di optimalkan dengan penyesuaian diri dengan kepada masyarakat bekerja, serta membuat strategi, pemikiran atau ide yang inovatif, guna meningkatkan kinerja Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Paniai Provinsi Papua.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Mitchel dan Larson.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kinerja aparatur Dinas Sosial pada program Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Paniai untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Paniai beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, M. and Baron, A. 1998. *Performance Management – The New Realities*. London: Institute of Personnel and Development
- Imron, Imron. 2018. “*Aspek Spiritual Dalam Kinerja*.” UNIMMA PRESS
- Simangunsong, F. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Tunai
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Gubernur Papua Nomor 66 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring, Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial
- Putri, Noviyanti, Ririn. 2020. Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 20(2): 705-709 <https://kongkrit.com/kondisi-perekonomian-indonesia-dimasa-pandemi-covid-19/>. diakses pada 7 September 2021, Pukul 17.00 WITA